BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang bergerak di bidang industri telekomunikasi.

PT. INTI merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan berstatus perusahaan perseroaan yang menjelma dari kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan Negara Telekomunikasi. Sejak didirikan hingga sekarang PT. INTI berkedudukan di komplek eks laboratorium Pos, Telepon, dan Telegraf (PTT), jalan Moch. Toha No. 77, Bandung. Adapun tahap-tahap perkembangan PT. INTI akan dijelaskan dibawah ini.

A. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1926 di dirikan Laboratorium Pos, Telepon, dan Telegraf (PTT) didaerah Tegalega (sekarang jalan Moch. Toha No. 77, Bandung)

Dan kemudian disusul dengan didirikannya Laboratorium Radio dan Pusat Perlengkapan Radio di lokasi yang sama pada tahun 1929.

B. Periode Tahun 1945-1960

Setelah Perang Dunia selesai, Laboratorium PTT dan Laboratorium Radio di tingkatkam lagı kedudukannya menjadi Laboratorium Telekomunikasi yang mencakup seluruh bidang, yaitu Telepon, Telegraf, dan Radio. Sedangkan pusat perlengkapan Radio dirubah menjadi Bengkel Pusat Telekomunikasi.

C. Periode Tahun 1960-1969

Perkembangan lebih lanjut PT. INTI dimulai sejak diadakannya kerja sama antara PN Telekomunikasi dengan Siemens AG pada tanggal

25 Mei 1996 dan pelaksanaannya dibebankan pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

(LPP POSTEL). Untuk merealisasikan kerja sama tersebut, maka pada tanggal 17 Februari 1968 dibentuk sutu bagian pabrik telepon dalam organisasi LPP POSTEL. Dengan adanya unsur industri pada lembaga ini, selanjutnya LPP POSTEL diubah menjadi Lembaga Penelitian Pengembangan Industri Pos dan Telekomunikasi (LPPI POSTEL) yang berpangkal pada bagian pabrik telepon diresmikan pembukaannya oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Presiden Soeharto, yang diawali oleh Menteri Ekuin Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 22 Juni 1968.

D. Periode Tahun 1967-1979

Pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1970 diadakan rapat kerja Pos dan Telekomunikasi di Jakarta. Hasil rapat tersebut antara lain LPPI POSTEL diberi waktu lebih kurang empat tahun untuk mempersiapkan diri agar dapat berdiri

sendiri di bidang keuangan, kepegawaian, dan peralatan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan terutama pada bidang penelitian dan bidang industri, pada tahun 1972 dilakukan pemisahan tugas pokok sebagai berikut:

- Lembaga penelitian dan pengembangan yang mempunyai tugas pokok dalam bidang pengujian, penelitian, dan pengembangan saran pos dan telekomunikasi baik dari segi telekomunikasi naupun dari segi operasional.
- Lembaga Industri, sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dengan tugas pokok memproduksi sarana dan alat-alat telekomunikasi.

Berdasarklan pemisahan tersebut diatas, pada tahun 1972 didirikan Proyek Industri Telekomunikasi yang berasal dari Lembaga Industri Telekomunikasi yang bersal dari Lembaga Industri.

Maksud dan Tujuan dari Proyek Industri Telekomunikasi adalah:

- Meningkatkan produksi-produksi dalam negeri yang berupa alat-alat telekomunikasi, baik untuk memenuhi kebutuhan Perumtel (sekarang Telkom), maupun badan atau organisasi lain yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri (Exsport).
- Penghematan devisa bagi kebutuhan alat-alat telekomunikasi.
- Membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung sejumlah besar tenaga kerja.

Tugas proyek industri telekomunikasi adalah merencanakan dan menetapkan sebagai berikut:

- Bentuk usaha dan bentuk hukum badan-badan usaha perindustrian Telekomunikasi yang di perlukan.
- Peraturan-peraturan tentang pemisahan atau penyediaan materil dan fasilitas lembaga penelitian dan pengembangan pos dan telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh Badan UsahaPerindustrian Telekomunikasi yang bersangkutan.
- Tata cara prosedur pendirian badan hukum perusahaan Perindustrian telekomunikasi dengan mengikut sertakan modal dalam negeri dan luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pendirian persero dikuasakan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 1771/MK/IV/12/1974

Tertanggal 28 Desember 1974 Akta Notaris Abdul Latief, Jakarta,

No. 322, Proyek Industri Telekomunikasi diubah bentuknya menjadi

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) mulai tanggal

30 Desember 1974 dengan menggunakan modal sebesar

Rp 3.200.000.000,00. Untuk membangun Telekomunikasi Indonesia di masa depan, PT. INTI telah membangun tahapan-tahapan pembangunan dalam menghadapi perubahan dari tenologi analog yang selam ini mendominasi sistem telekomunikasi dunia menuju ke teknologi di gital, berdasarkan kemampuan pembangunan dan pengalaman-pengalaman di masa lampau.

Dimulai dari tahun 1980, periode pembangunan telekomunikasi disusun dengan strategi .

E. Periode Tahun 1980-1985 (Periode Konsolidasi)

Melakukan beberapa langkah persiapan dan penyesuaian diri pada pembangunan selama dasa warsa sebelumnya (1970-1979) meliputi inventarisasi, evaluasi ulang, dan persiapan pembangunan.

F. Periode Tahun 1985-1990 (Periode Introduksi Teknologi Baru)

Mencoba model-model telekomunikasi yang telah direncanakan sebelumnya. Jaringan dasar baik switching maupun tranmisi yang merupakan bagian terpenting dari jaringan sistem telekomunikasi nasional mulai diterapkan dan dikaji perananya untuk penyusunan model komunikasi masa depan. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perencanaan dikaji kembali dan disesuaikan dengan kenyataan.

Pada tanggal 16 Oktober 1989 PT. INTI yang berada di bawah Depparpostel di serah terimakan kepada Badan Pengelola Industri Strategia (BPIS).

G. Periode Tahun 1990-1995 (Periode Pemantapan)

Periode ini di harapkan parameter pembangunan sudah tampak, sehingga bentuk jaringan telekomunikasi dapat disusun secara mantap. Pembangunan Industri Telekomunikasi Nasional diharapkan telah mencapai pemantapan, sehingga pembangunan telekomunikasi Nasional praktis sudah dapat didukung sepenuhnya. Pada tahap ini standar Internasional akan tersedia dan dapat direalisasikan.

H. Periode Tahun 1995 sampai sekarang

Di tahun 1995-1996 keadaan perekonomian masih stabil, aktifitas bagian produksi masih berjalan dengan lancar. Tetapi tahun 1997, tepatnya pada awal Juni, Negara Indonesia mengalami goncangan dalam bidang perekonomian atau lebih dikenal dengan nama krisis moneter. Akibatnya kontrak-kontrak terpaksa dibatalkan, penagihan-penagihan dipending, keadaan ini jelas sangat mempengaruhi perkembangan PT.INTI (persero).

3.2 Stuktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi yang ditetapkan di PT. INTI merupakan sistem organisasi *Line Staff,* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran setelah tulisan ini. Adapun kekuasaan tertinggi dalam perusahaan terletek pada Menteri Keuangan yang meıupakan pemegang saham dalam RUPS melalui dewan komisaris, serta mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, dalam hal ini:

1. Mengawasi pekerjaan dan tindakan-tindakan direksi.
2. Mengawasi keuangan perusahaan.
3. Mengawasi bidang tekhnik

Sedangkan PT. INTI di pimpin oleh seorang direktur utama yang mengepalai empat direktorat, yaitu:

- Direktorat Niaga
- Direktorat Produksi

- Direktorat Teknik
- Direktorat Administrasi

Setiap direktorat dikepalai oleh seorang Direktur, dengan unsur-unsur pimpinan secara lengkap sebagai berikut:

Direksi, yang terdiri dari :

- Direktur Utama, sebagai pemimpin umum.
- Para Direktur, sebagai pimpinan direktorat.
- General Manager, sebagai pimpinan divisi.
- Kepala Bagian, sebagai pimpinan bagian.
- Kepala Urusan, sebagai pimpinan urusan.

Dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan, PT. INTI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yamg bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan Menparpostel. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Utama memimpin:

- Anggota Direksi, sesuai bidangnya.
- Kepala SPI (Satuan Pengawas Interen), kepala SPI bertugas pokok membantu Direktur Utama dibidang pengawasan dalam mengadakan penelitian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaanya pada pereusahaan dengan memberi saran-saran perbaikan. Dalam tugasnya kepala SPI memimpin:
- Kepala Bidang Pemeriksaan Keuangan
- Kepala Bidang Pemeriksaan Khusus
- Kepala Bidang Pemeriksaan Operasional
- Bagian Administrasi dan Pengendalian Pemeriksaan.

Sementara itu tugas dari Direksi Utama adalah :

- Memimpin dan mengurus perseroan bersama-sama anggota direksi lainnya sesuai dengan tujuan perseroan sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 anggaran dasar perseroan dan melaksanakan putran / arahan pemegang saham dan dewan komisaris senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan (perseroan).

Sedangkan anggota direksi yang dibawahi oleh direktur utama yaitu :

1. Direktur Niaga, yang tugas pokoknyaadalah mengelola perusahaan dibidang niaga yang meliputi pemasaran, sales enginering dan perlengkapan secara berdaya guna dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara optimsl, adapun direktorat niaga membawahi :
   - Divisi pemasaran
   - Divisi perlengkapan
2. Direktorat produksi, tugas pokoknya adalah mengelola perusahaan didalam bidang produksi yang meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, pabrikasi, produksi sentral serta komunikasi data, direktorat produksi membawahi :
   - Divisi perencanaan dan pengendalian produksi
   - Divisi pabrikasi
   - Divisi produksi sentral dan terminal.
3. Direktorat Administrasi dan keuangan, tugas pokoknya adalah mengelola perusahaan dibidang administrasi dan keuangan yang meliputi sumber daya

manusia, keuangan, akuntansi yaitu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara optimal.

Direktorat ini membawahi:

- Divisi sumber daya manusia
- Divisi Keuangan
- Divisi Akuntansi
- Divisi Umum

3.3 Struktur Organisasi SBU. SENTRAL bagian pembelian PT.INTI

3.3.1 Job DesCription

Berdasarkan masalah yang akan penulis bahas maka akan diuraikan juga tentang fugsi dan tugas bagian pengadaan material

Bagian pengadaan Material terdiri dari satu orang Ka. SBU, satu orang manajer dan beberapa sub unit. Adapun tugas pokoknya dari beberapa sub unit yang ada dibagian pengadaan material adalah sebagai berikut :

a. Urusan Rendalbel

Uraian tugas :

1. Melakukan Kegiatan perencanaan dan pengendalian pengadaan material/jasa dan fasilitas operasi.
2. Melakukan Prakualifikasi calon pemasok dan mengevaluasinya.
3. Membuat laporan atas Kegiatan bagian pembelian
4. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Perkantoran bagian pembelian.

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.SBU dan manajer.

b. Urusan Belmat

Uraian tugas:

1. Melaksanakan Kegiatan perencanaan dan pengendalian pembelian material / jasa
2. Melakukan kegiatan pembelian material / Jasa termasuk Proses pengeluaran barang import dari elabuhan.
3. Melaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Ka. SBU dan manager.

c. Urusan Belfasop

Uraian tugas :

1. Melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembelian fsilitas operasi SBU sentral.
2. Melakukan Kegiatan pembelian fasilitas operasi SBU Sentral.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan oleh Ka. SBU dan manager.

d. Urusan Dangrima

Uraian tugas :

1. Melakukan Pengaturan terhadap kegiatan pergudangan (level peti)
2. Menerima material dari pemasok okal/import sesuai SPK/PO? Kontrak yang dilaksanakan oleh bagian Pembelian.
3. Menyerahkan atau mendistribusikan barang bagian yang memesan.